KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Terseok-seok Turunkan Tengkes
Tanggal : Minggu, 14 Januari 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Terseok-seok Turunkan Tengkes

Target penurunan tengkes ke 14% kian sulit dicapai di tengah pelaksanaan pemilu dan pilkada yang ikut menyibukkan pemerintah daerah.

Despian Nurhidayat
despian@mediaindonesia.com

UPAYA pemerintah untuk menurunkan angka tengkes tidak mencapai hasil yang sesuai dengan harapan. Hal itu membuat target penurunan prevalensi tengkes ke 14% populasi balita pada tahun ini muskil tercapai.

Di banyak daerah, jumlah anak yang mengalami hambatan pertumbuhan tidak berkurang signifikan, bahkan beberapa mencatatkan kenaikan. Seperti di Jawa Tengah, angka tengkes sampai akhir 2023 diperkirakan akan meningkat menjadi 21% dari 20,8% di tahun sebelumnya. Angka resmi belum dirilis, tetapi indikasi kenaikan terlihat dari angka tengkes yang naik di 20 kabupaten/kota.

Hal itu diakui Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana. Meski begitu, ia tetap optimistis. "Pada 2024 ini, kita berharap dapat terus dilakukan upaya dan program agar sesuai dengan target," ujar Nana, kemarin.

Angka prevalensi tengkes di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 2023 juga masih membandel di angka 27%, hanya turun 0,2% dari angka di 2022.

Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengatakan memperkecil angka tengkes bukan perkara mudah.

Pihaknya kini berupaya mencapai target nasional dengan terlebih dahulu membangun satu data melalui aplikasi *Inzting* agar penanganan tengkes tepat sasaran.

Pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar menilai target penurunan prevalensi tengkes ke 14% pada tahun ini sangat ambisius. Target itu sulit diwujudkan jika tidak dibarengi penanganan secara komprehensif.

Dikatakan Iqbal, penanganan tengkes masih fokus pada aspek kesehatan saja. Padahal, persoalannya melibatkan hal yang kompleks, mulai aspek sosial, ekonomi, hingga adat.

"Jadi, kalau mau benar-benar memperbaiki persoalan *stunting* (tengkes), ini perlu penanganan secara serius dalam hal sosial-ekonomi masyarakat," tegas Iqbal kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Memasuki tahun politik saat ini, Iqbal menyebut target penurunan tengkes kian sulit dicapai. Persoalan tengkes kemungkinan besar terpinggirkan dari prioritas anggaran karena daerah bakal disibukkan pemilu dan pilkada.

Mendesak

Anggota Komisi IX DPR RI Kris Dayanti menyatakan DPR selalu memprioritaskan pengalokasian anggaran untuk penanganan tengkes yang umumnya disebabkan gizi buruk. Ia mendesak pemerintah pusat ataupun daerah bergerak lebih cepat mengejar target yang dicanangkan.

"Peristiwa anak mengalami gizi buruk tidak hanya terjadi di kota-kota kecil, di Ibu Kota juga terindikasi masih ada anak yang mengalami kekurangan gizi akibat perekonomian keluarganya," tutur Kris.

Meski secara nasional penurunan tengkes terhitung lamban, sejumlah daerah sukses menekan prevalensi hingga ke bawah 10%. Di Kabupaten Sumedang contohnya, angka tengkes menurun drastis dari 32,2% pada 2018 menjadi 8,27% pada 2022 dan 7,96% di 2023.

Pemda setempat menerapkan aplikasi Sistem Pencegahan Stunting Terintegrasi (Simpati) untuk memantau secara ketat intervensi tengkes dan perkembangan balita.

Di daerah-daerah, upaya penurunan tengkes dilakukan antara lain lewat pasar murah, program orangtua asuh atau donatur, pemberian makanan tambahan, serta pendampingan keluarga.
(AS/LN/SG/YH/MS/RS/HK/RF/BB/X-10)

